

SEKRETARIAT PUSAT KEUANGAN POLRI
SUBBAG PEMBINAAN FUNGSI

NOTA DINAS

Nomor : B/ND- 28 /I/HUK.3.2./2021

Kepada : Yth. 1. Sespuskeu (Kasubbag Ren & Kasubag Sumda)
2. Kabid Bia
3. Kabid Apk
4. Kabid Dal
5. Kaurkeu

Dari : Kapuskeu Polri

Perihal : permintaan perbaikan SOP.

1. Rujukan:

- a. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 1 April 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri;
- b. Hasil Rapat Puskeu Polri tanggal 25 Januari 2021 dalam rangka coffee morning;
- c. Disposisi Kapuskeu Polri tanggal 25 Januari 2021 " tolong cek ulang, Bid Dal perlu ditambah SOP yang sesuai dengan Tupoksinya".

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan kepada tersebut alamat bahwa setelah dilakukan koreksi oleh Kapuskeu Polri, terdapat beberapa koreksi sebagai berikut:

a. Subbag Ren:

- 1) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) perlu ditambahkan memaparkan konsep renja Satker kepada para Kabid/Kasubbag/Kasubbid;
- 2) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) penempatan nomor 3 menjadi nomor 4 dan nomor 4 menjadi nomor 3;
- 3) Penyusunan Pagu Indikatif penempatan nomor 4 menjadi nomor 3 dan nomor 3 menjadi nomor 4;
- 4) Penyusunan revisi anggaran sumber dana PLN, RMP dan PDN tidak sesuai dengan judul isinya LKIP;
- 5) Penyusunan monev anggaran point pertama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Satker, caranya monitoring bagaimana? Dan cara evaluasinya bagaimana?;
- 6) Pengajuan lembar kerja evaluasi (LKE)/RBP poin pertama Keputusan Kapolri Nomor: KEP/541/V/2016 tentang road map reformasi birokrasi Polri (ini bukan kegiatan);
- 7) Penyusunan revisi anggaran sumber dana PLN, RMN dan PDN judulnya salah atau isinya yang salah?.

b. Subbag Sumda:

- 1) Kenaikan pangkat Polri atau usulan kenaikan pangkat Polri;
- 2) Kenaikan pangkat PNS atau usulan kenaikan pangkat PNS;
- 3) Usulan kenaikan gaji berkala Polri, kolom nomor kegiatan harus diturunkan;
- 4) Prosedur penghapusan Barang Milik Negara, Assarpras ganti dengan Aslog (nomor urut 7, 11, 12 dan 13);
- 5) Usulan pengadaan sarana dan prasarana, apakah isinya (ATK dll) termasuk sarpras?;
- 6) Judul SOP sama dengan point 4 tapi isinya tentang ATK apakah ini termasuk sarpras?.

c. Urkeu:

- 1) Penyusunan laporan keuangan, cek lagi apakah uraian kegiatan sesuai judul SOP?;
- 2) Ada uraian tugas tapi tidak ada indikator;
- 3) Pembayaran Tunkin personel menjadi pembayaran tunkin personel Puskeu Polri.

d. Bid Bia:

- 1) Dasar hukum tentang pengelolaan Samsat disesuaikan dengan yang sekarang dan dasar hukumnya disesuaikan;
- 2) Penyusunan laporan keuangan PDN & PHLN, ini laporan bulanan, triwulan, semester atau tahunan?;
- 3) Penyusunan laporan dana jasa raharja, laporan bulanan atau semesteran?;
- 4) Dasar hukum pemeriksaan dan pembayaran jaldis mutasi tidak pakai dana;
- 5) Penyusunan laporan dana jaldis mutasi, Bulanan?, triwulan?, Tahunan?;
- 6) Penyusunan laporan dana tunjangan kinerja, Bulanan?, Triwulan?, Tahunan? dan dasar hukumnya;

e. Bid Apk:

- 1) Koordinasi dengan Direktorat APK Kemenkeu terkait Bultek, SAP, BAS, penyusunan dan penyajian Lapkeu satker BLU dan Non BLU, kegiatan koordinasi ini bisa dijadikan satu SOP saja;
- 2) Memonitor, menganalisa dan evaluasi data satker pada aplikasi LK dari kemenkeu (e-rekon & LK) setiap bulan, periode semesteran dan periode Akhir Tahun, monitoring itu apa kegiatannya?, apa yang dievaluasi?, apa yang dianalisa?;
- 3) Memonitor, menganalisa dan evaluasi Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dan OMSPAN, apa yang dimonitor?, apa yang dianalisa?;

f. Bid Dal:

- 1) Penyempurnaan dan revisi pilun-pilun keuangan di kepolisian Negara Republik Indonesia, nama SOP dengan kegiatan tidak nyambung;
- 2) Seharusnya pelaporan realisasi tunjangan kinerja dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Penyajian dan penyampaian informasi, point 3 membuat nota dinas permohonan ACC untuk dapat di upload ke website Divhumas, ini nanti website puskeu sendiri

3. Bersama ini dikirim revisi SOP sesuai dengan tupoksinya, mohon kiranya dapat diperbaiki, sebagaimana terlampir dan dikirim ke Subbag Binfung paling lambat tanggal 2 Februari 2010 beserta soft copynya.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 27 Januari 2021

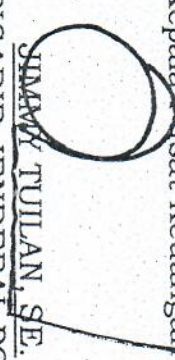
KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI


LUKAS AKEBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

BIDANG PEMBIAYAAN

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan :
Disahkan Oleh : Kepala Pusat Keuangan Polri


JIMMY TULAN, SE.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Nama SOP : Pinjaman Sementara Dana Samsat

Dasar Hukum

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pengelolaan Dana Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap di Lingkungan Kepolisian Negara epublik Indonesia;
2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/563/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Penggunaan Dana yang Bersumber dari Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (Samsat) di Lingkungan Kepolisian Negara epublik Indonesia.

Keterkaitan :

1. Pertanggungjawaban keuangan;
2. Laporan Keuangan
3. Kegiatan yang tidak terdukung DIPA

Peringatan:

Pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan operasional yang tidak didukung oleh DIPA

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami tentang Peraturan Pengelolaan Dana Samsat
2. Mempunyai wawasan luas dan mampu dalam bidangnya,
3. Komunikatif, koordinatif dan aspiratif, memiliki kepat tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dibeban

Peralatan/Perlengkapan:

Komputer, laptop, telepon, printer, kalkulator, ATK

Pencatatan dan Pendataan:

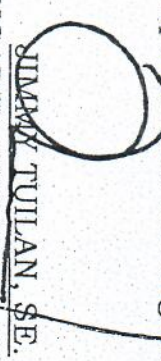
1. Buku Kas Bank
2. Sprin Kapolri
3. Surat pengajuan dari Satker pengguna

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**

Dasar Hukum 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pengelolaan Dana Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/563/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Penggunaan Dana yang Bersumber dari Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (Samsat) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keterangan: 1. Laporan Keuangan Penyaluran Dana Samsat 2. Penyaluran Dana Samsat Peringatan: Pengaruh terhadap wasrik Itwasum dan BPK dan terhadap opini atas laporan keuangan dari BPK	Nomor SOP : _____ Tanggal Pembuatan : _____ Tanggal Revisi : _____ Tanggal Pengesahan : _____ Disahkan Oleh : Kepala Pusat Keuangan, Polri  <u>JIMMY TULLAN, S.E.</u> BRIGADIR JENDERAL POLISI Nama SOP : Penyusunan Laporan Dana Samsat Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami tentang Peraturan Pelaporan Keuangan 2. Mempunyai wawasan luas dan mampu dalam bidangnya 3. Komunikatif, koordinatorif dan aspiratif, memiliki kepat tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang di bebar Peralatan/Perlengkapan: Komputer, laptop, telepon, printer, kalkulator, ATK Pencatatan dan Pendataan: Realisasi Penyaluran Dana Samsat
---	--

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	:
Disahkan Oleh	: Kepala Pusat Keuangan Polri


JIMMY TJULAN, S.E.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Dasar Hukum

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pengelolaan Dana Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/563/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Penggunaan Dana yang Bersumber dari Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (Samsat) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keterkaitan :

1. Laporan Keuangan Dana Samsat
2. Pertanggungjawaban keuangan;

Peringatan:

Pengaruh terhadap wasrik Itwasum dan BPK dan terhadap opini atas laporan keuangan dari BPK

Nama SOP : Pemeriksaan dan Pembayaran Dana Sarr

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami tentang Peraturan Pengelolaan Dana Samsa
2. Mempunyai wawasan luas dan mampu dalam bidangnya;
3. Komunikatif, koordinator dan aspiratif, memiliki kepe tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang di be

Peralatan/Perlengkapan:

Komputer, laptop, telepon, printer, kalkulator, ATK

Pencatatan dan Pendataan:

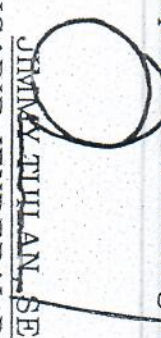
1. Buku Kas Bank
2. Sprin Kapolri
3. Surat pengajuan dari Satker pengguna

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**

Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; ^{1b} 2. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER/16/PB/2013 Pasal 9 ayat 3 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Nomor SOP Tanggal Pembuatan: Tanggal Revisi : Tanggal Pengesahan : Disahkan Oleh : Kepala Pusat Keuangan Polri </td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: center;">  SHAMMY JULIAN. SE. BRIGADIR JENDERAL POLISI </td> </tr> </table>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan: Tanggal Revisi : Tanggal Pengesahan : Disahkan Oleh : Kepala Pusat Keuangan Polri	 SHAMMY JULIAN. SE. BRIGADIR JENDERAL POLISI
Nomor SOP Tanggal Pembuatan: Tanggal Revisi : Tanggal Pengesahan : Disahkan Oleh : Kepala Pusat Keuangan Polri	 SHAMMY JULIAN. SE. BRIGADIR JENDERAL POLISI		
Nama SOP : Pemeriksaan dan Pembayaran Tunjangan	Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami tentang Pengelolaan Dana Tunkin, 2. mempunyai wawasan luas dan mampu dalam komunikatif, koordinatif dan aspiratif 3. memiliki kepatuhan dan tanggung jawab dalam mel tugas yang dibebankannya. <i>Shm 2013</i>		
Keterkaitan: 1. Permintaan Dana Tunkin dari Bidkeu 2. Realisasi atas DIPA Polri; 3. Penyaluran Dana melalui Bank Persepsi.	Peralatan/Perlengkapan: Komputer, laptop, telepon, printer, kalkulator, ATK		
Peringatan: 1. Pengaruh terhadap pembayaran tunkin secara tepat waktu 2. Tidak terbayarkannya tunkin anggota Polri	Pencatatan dan Pendataan: Rekapitulasi Jumlah Penggajian Tunkin		

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan Oleh	:	Kepala Pusat Keuangan Polri


JHANNY LILUAN, SE.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Dasar Hukum

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/758/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Penggunaan Dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang Bersumber dari Bantuan Biaya Operasional PT. Jasa Raharja (Persero).

Keterkaitan :

1. Pertanggungjawaban keuangan;
2. Laporan Keuangan
3. Kegiatan yang tidak terdukung DIPA

Peringatan:

Pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan operasional yang tidak didukung oleh DIPA

Nama SOP : Pemeriksaan dan Pembayaran Jasa Raharja

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami tentang Peraturan Pengelolaan Dana Jasa Raharja
2. Mempunyai wawasan luas dan mampu dalam bidangnya
3. Komunikatif, koordinatif dan aspiratif, memiliki kepatuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dibebakan

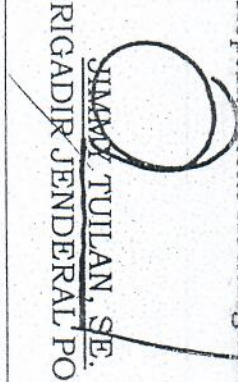
Peralatan/Perlengkapan:

Komputer, laptop, telepon, printer, kalkulator, ATK

Pencatatan dan Pendataan:

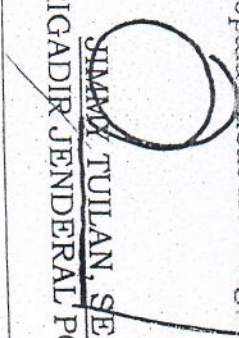
1. Buku Kas Bank
2. Sprin Kapolri
3. Surat pengajuan dari Satker pengguna

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**

	Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : Tanggal Pengesahan : Disahkan Oleh : Kepala Pusat Keuangan Polri
	 JIMMY TULLAN, SE. BRIGADIR JENDERAL POLISI
Dasar Hukum	Nama SOP : Penyusunan Laporan Keuangan PDN & PH Kualifikas :
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	1. Mer 2. Mer 3. Kon tanj
Keterkaitan :	Peralatan,
1. Laporan Keuangan Sumber Dana PDN & PHLN	Komputer
2. Realisasi Pengelolaan Sumber Dana PDN & PHLN	
Peringatan:	Pencatat
Pengaruh terhadap wasrik Itwasum dan BPK dan terhadap opini atas laporan keuangan dari BPK	Pengelola

*ini bukan, terima,
 menteri atau bukan?*

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**

	Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : Tanggal Pengesahan : Disahkan Oleh : Kepala Pusat Keuangan Polri  JIMMY TULLAN, SE. BRIGADIR JENDERAL POLISI
Dasar Hukum	Nama SOP : Penyusunan Laporan Keuangan PDN & PH Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami tentang Peraturan Pelaporan Keuangan 2. Mempunyai wawasan luas dan mampu dalam bidangnya 3. Komunikatif, kordinatif dan aspiratif, memiliki kepat tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dibeban
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.	
Keterangan :	Peralatan/Perlengkapan:
1. Laporan Keuangan Sumber Dana PDN & PHLN	Komputer, laptop, telepon, printer, kalkulator, ATK
2. Realisasi Pengelolaan Sumber Dana PDN & PHLN	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Pengaruh terhadap wasrik Itwasum dan BPK dan terhadap opini atas laporan keuangan dari BPK	Pengelolaan Sumber Dana PDN & PHLN

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan Oleh	:	Kepala Pusat Keuangan Polri


J. M. T. J. AN. SE.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Dasar Hukum

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/758/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Penggunaan Dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang Bersumber dari Bantuan Biaya Operasional PT. Jasa Raharja (Persero).

Kualifikasi

1. Mem
2. Mem
3. Kom

Belman, Samsudin

Keterangan :

1. Laporan Keuangan Penyaluran Dana Jasa Raharja
2. Penyaluran Jasa Raharja

Peringatan:

Pengaruh terhadap wasrik Itwasum dan BPK dan terhadap opini atas laporan keuangan dari BPK

Nama SOP

: Penyusunan Laporan Dana Jasa Raharja

Peralatan/

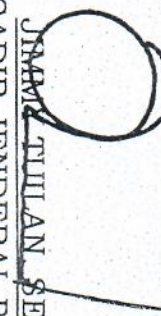
Komputer,

Pencatatan

Realisasi P

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan :
Disahkan Oleh : Kepala Pusat Keuangan Polri


JAMAR TULAN, SE.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Nama SOP : Penyusunan Laporan Dana Jasa Raharja

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/758/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Penggunaan Dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang Bersumber dari Bantuan Biaya Operasional PT. Jasa Raharja (Persero).

1. Memahami tentang Peraturan Pelaporan Keuangan
2. Mempunyai wawasan luas dan mampu dalam bidangnya
3. Komunikatif, koordinatif dan aspiratif, memiliki kepat tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dibeban

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan:

1. Laporan Keuangan Penyaluran Dana Jasa Raharja
2. Penyaluran Jasa Raharja

Komputer, laptop, telepon, printer, kalkulator, ATK

Peringatan:

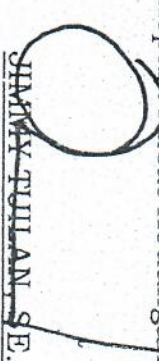
Pencatatan dan Pendataan:

Pengaruh terhadap wasrik Itwasum dan BPK dan terhadap opini atas laporan keuangan dari BPK

Realisasi Penyaluran Dana Jasa Raharja

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	:
Disahkan Oleh	: Kepala Pusat Keuangan Polri


JHANNY PUJIAN SE
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Dasar Hukum

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-7/PB/2013 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Nama SOP : Pemeriksaan dan Pembayaran ~~Marka Jaldis~~
Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami tentang Pengelolaan Dana Jaldis Mutasi,
2. Mempunyai wawasan luas dan mampu dalam bidangnya,
3. Komunikatif, koordinator dan aspiratif, memiliki kepa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dibebankan

Keterkaitan :

1. Realisasi atas DIPA Polri;
2. Penyaluran Dana melalui Bank Persepsi
3. Tersalurkan kepada personel yang melaksanakan mutasi dengan biaya negara

Peralatan/Perlengkapan:

Komputer, laptop, telepon, printer, kalkulator, ATK

Peringatan:

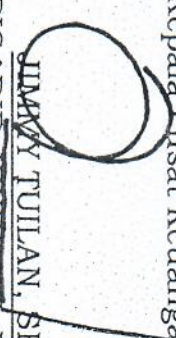
Pengaruh terhadap daya serap Jaldis mutasi dan tersalurkannya daru jaldis mutasi secara tepat waktu

Pencatatan dan Pendataan:

Data personel yang melaksanakan mutasi dengan biaya negara

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	:
Disahkan Oleh	: Kepala Pusat Keuangan Polri


JIMMY TJULAN, SE.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

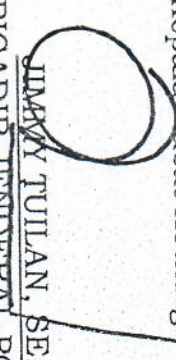
Nama SOP : Penyusunan Laporan Dana Jaldis Mutasi

Dasar Hukum	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-7/PB/2013 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kualifika	1. Me 2. Me 3. Kori <i>bulanan ? m? m?</i>

Keterkaitan :	Peralatan
1. Laporan Keuangan Penyaluran Dana Jaldis Mutasi	Komputer
2. Realisasi Dana Jaldis Mutasi	
Peringatan:	Pencatata
Pengaruh terhadap wasrik Itwasum dan BPK dan terhadap opini atas laporan keuangan dari BPK	Realisasi]

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan Oleh	:	Kepala Pusat Keuangan Polri


**JIMMY TUILAN, SE.
BRIGADIR JENDERAL POLISI**

Nama SOP : Penyusunan Laporan Dana Jaldis Mutasi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-7/PB/2013 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Memahami tentang Peraturan Pelaporan Keuangan
2. Mempunyai wawasan luas dan mampu dalam bidangnya
3. Komunikatif, koordinatif dan aspiratif, memiliki kepa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dibeba

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan:

1. Laporan Keuangan Penyaluran Dana Jaldis Mutasi
2. Realisasi Dana Jaldis Mutasi

Komputer, laptop, telepon, printer, kalkulator, ATK

Peringatan:

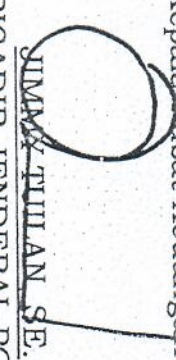
Pencatatan dan Pendataan:

Pengaruh terhadap wasrik Itwasum dan BPK dan terhadap opini atas laporan keuangan dari BPK

Realisasi Penyaluran Dana Jaldis Mutasi

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan Oleh	:	Kepala Pusat Keuangan Polri


JIMMY TULIAN, SE.
 BRIGADIR JENDERAL POLISI

Nama SOP : Penyusunan Laporan Dana Tunjangan Kinerja

Kualifika

1. Me
2. Me
3. Ko

tar

↓
 ulan ? tr ? thum ?

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; ¹³
2. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-7/PB/2013 Pasal 9 ayat 3 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keterkaitan :

Peralatar

1. Laporan Keuangan Penyaluran Dana Tunjangan Kinerja

Kompute

2. Realisasi Dana Tunjangan Kinerja

Peringatan:

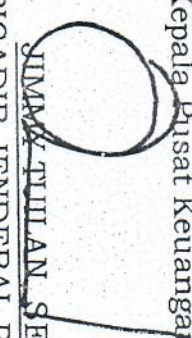
Pencatat

Pengaruh terhadap wasrik Itwasum dan BPK dan terhadap opini atas laporan keuangan dari BPK

Realisasi

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan :
Disahkan Oleh : Kepala Pusat Keuangan Polri


JIMMY TULIAN SE
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Nama SOP : Penyusunan Laporan Dana Tunjangan Kiri

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami tentang Peraturan Pelaporan Keuangan
2. Mempunyai wawasan luas dan mampu dalam bidangnya
3. Komunikatif, koordinator dan aspiratif, memiliki kepat tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dibeban

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-7/PB/2013 Pasal 9 ayat 3 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keterkaitan :

1. Laporan Keuangan Penyaluran Dana Tunjangan Kinerja
2. Realisasi Dana Tunjangan Kinerja

Peringatan:

Pengaruh terhadap wasrik Itwasum dan BPK dan terhadap opini atas laporan keuangan dari BPK

Peralatan/Perlengkapan:

Komputer, laptop, telepon, printer, kalkulator, ATK

Pencatatan dan Pendataan:

Realisasi Penyaluran Dana Tunjangan Kinerja